

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di era revolusi industri 4.0 saat ini tentunya memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan peradaban pada berbagai segi kehidupan manusia. Terjadi fenomena disrupsi yang mendorong segala aktivitas masyarakat mengandalkan digitalisasi, hal ini membawa masyarakat pada kondisi transisi revolusi yang secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi. Sehingga urgensi dan transformasi pada organisasi sektor pemerintah dalam menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin meningkat dengan disertai tuntutan responsif yang tinggi dan cepat. Akuntabilitas publik ini diminta untuk menunjukkan bagaimana kemampuan organisasi atau perusahaan dalam membelanjakan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Sebagaimana termaktub dalam UU No. 22 dan 25 tahun 1999 yang menjadi dasar dalam proses reformasi lembaga sektor publik di Indonesia. Kedua undang-undang tersebutlah yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dan organisasi dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Adapun undang-undang tersebut dikembangkan menjadi UU No. 32 dan 33 tahun 2004. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam bentuk APBD yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menggunakan dana yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) baik dilihat dari *input, output, outcome, impact*, serta benefitnya. Oleh karena itu dilakukan pertanggungjawaban pada masyarakat dengan implementasi konsep pengukuran kinerja guna menilai akuntabilitas organisasi atau lembaga dalam pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pertanggung jawaban atas realisasi anggaran dituangkan dalam suatu laporan keuangan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa anggaran dan laporan keuangan pada dapat mempengaruhi kinerja suatu instansi bersangkutan. Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan organisasi. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan (Hery, 2015). Sedangkan menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan kinerja keuangan merupakan suatu kegiatan yang bersifat membangun guna evaluasi, efektivitas, dan efisiensi organisasi atau perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdayanya.

Oleh karena itu sangat diperlukan pengukuran kinerja keuangan guna menilai pencapaian kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan visi dan misi organisasi sehingga perkembangannya dapat dikeahui dan di evaluasi, serta meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdayanya. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting dalam menilai

akuntabilitas. Dalam pengukuran kinerja keuangan APBD dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaiannya dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kinerja keuangan organisasi sektor publik cenderung meningkat atau cenderung mengalami penurunan.

Menurut Bastian (2012), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Salah satu organisasi sektor publik atau instansi yang memerlukan adanya pengukuran kinerja keuangan adalah Puskesmas. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan salah satu organisasi sektor publik yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan baik di daerah perkotaan sampai daerah pedesaan. Dalam organisasi sektor publik, tentunya juga dituntut untuk transparansi dan akuntabel agar APBD dan anggaran lainnya dipergunakan dengan semestinya. Salah satu konsep untuk menganalisis kinerja keuangan Organisasi Sektor Publik adalah dengan melakukan analisis *Value For Money* terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Konsep *Value For Money* merupakan salah satu konsep penting dari anggaran kinerja dari *good governance*.

Puskesmas Penanggal diharapkan agar memperhatikan *Value for Money* dalam menjalankan program kegiatan dan pelayanannya kepada masyarakat, dimana konsep pengelolaan organisasi sektor publik ini berdasarkan pada tiga elemen utama (Mardiasmo, 2018) yaitu :

1. Ekonomi, yang terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dalam hal ini Pemerintah dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros.
2. Efisiensi, merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu.
3. Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau secara sederhana merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis kinerja keuangan di Puskesmas Penanggal dengan penerapan konsep *Value For Money*. Dengan penerapan konsep *Value For Money* ini diharapkan Puskesmas Penanggal mampu mempertimbangkan *input, output dan outcome*. Bukan hanya sekedar pelaporan bahwa program kegiatan dan pelayanan telah dilaksanakan, namun dampak yang ditimbulkan nantinya bisa dinilai apakah sudah sesuai dengan tujuan dari program yang telah direncanakan. Disamping itu pengelolaan anggaran dipergunakan sebagaimana mestinya yang mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Puskesmas Penanggal dengan Pendekatan *Value For Money*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja keuangan Puskesmas Penanggal jika diukur dengan pendekatan *value for money*”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Puskesmas Penanggal yang diukur dengan metode analisis *Value for Money*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teortis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai kinerja keuangan sebuah instansi pemerintah dengan menggunakan pendekatan *value for money*.
2. Disamping itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai kinerja keuangan sebuah instansi pemerintah.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan memberi manfaat, antara lain:

1. Bagi Puskesmas Penanggal  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi saran maupun masukan sertamenjadi bahan evaluasi Puskesmas Penanggal untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya.
2. Bagi Mahasiswa/i  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa/i mengenai metode *Value For Money* yang diterapkan pada kinerja keuangan di organisasi sektor publik.
3. Bagi Penulis  
Penelitian ini bermanfaat guna menambah wawasan serta pengetahuan

penulis dalam penerapan *Value for Money* sebagai salah satu metode untuk pengukuran kinerja keuangan. Serta mendapat keselarasan antara ilmu yang diperoleh dengan realisasinya.

4. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

